

Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wilayah Hukum Kabupaten Bogor

Muhammad Rizki Kurniawan¹, J. Jopie Gilalo², Sudiman Sihotang³

¹Universitas Djuanda, rizkikurniawa17@gmail.com

²Universitas Djuanda, gilalojopie@gmail.com

³Universitas Djuanda, sudiman.sihotang@unida.ac.id

ABSTRAK

Jual beli satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan satwa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wilayah Hukum Kabupaten Bogor. Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mencoba menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari aktivitas atau perilaku masyarakat yang menyimpang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam penindakan jual beli satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di wilayah hukum kabupaten bogor dilihat dari dua aspek yaitu aspek tugas dan wewenang dan aspek penegakan hukum. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wilayah Hukum Kabupaten Bogor yaitu Sulitnya mengetahui aktivitas penangkapan, sampai penjualan hewan satwa yang dilindungi. Kondisi hutan Bogor yang begitu luas membuat kepolisian Polres Bogor sulit untuk mengetahui aktivitas pelaku jual beli satwa yang dilindungi di hutan maupun dalam kota. Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh pelaku juga memperhitungkan pengawasan pihak kepolisian sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan pelaku. Jumlah personil yang terbatas. Jumlah personil yang dimiliki oleh Polres Bogor khususnya Satuan Reserse Kriminal sangat terbatas.

Kata Kunci: jual beli, satuan reserse kriminal, penindakan, satwa

PENDAHULUAN

Satwa adalah semua jenis hewan yang hidup, baik yang hidup di air maupun yang hidup daratan. Berbagai jenis satwa hidup dan tumbuh serta berkembang seperti manusia. Banyak hewan yang diciptakan Allah yang maha esa dengan berbagai jenis, warna, dan pola berkembang biak yang berbeda.

Di Indonesia, terdapat jenis satwa yang dilindungi dan ada yang tidak dilindungi. Jenis satwa yang dilindungi merupakan hewan sulit ditemukan dan populasinya sedikit yang dapat punah bila tidak dilindungi. Yang dimaksud dengan dilindungi artinya dilarang untuk diburu, ditangkap, dikonsumsi, dan diperjual belikan. Sedangkan hewan yang tidak dilindungi ialah hewan yang jumlahnya masih banyak tidak terancam punah yang boleh ditangkap, dikonsumsi, diperjual belikan, dan diburu.

Terhadap satwa yang dilindungi, pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan sebagai upaya perlindungan, yang memuat jenis satwa yang dilindungi, larangan, dan sanksi yang diberikan kepada orang yang dengan sengaja memburu, mengkonsumsi, dan menjual belikan satwa yang dilindungi. Dalam peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan Nomor 20 Tahun 2018 terdapat beberapa jenis hewan yang dilindungi yang digolongkan dalam jenis mamalia, burung, dan ikan.

Pemerintah telah membentuk peraturan perundang-undangan untuk melindungi satwa yang dilindungi, namun tetap saja masih ada masyarakat yang melakukan pelanggaran dengan menjual hewan-hewan yang dilindungi. Beberapa kasus yang sudah diungkapkan oleh pihak kepolisian Polres Bogor diantaranya yang dirilis oleh detiknews pada tanggal 16 Februari Tahun 2023 bahwa seorang pria berinisial SM berusia 38 tahun menjual satwa yang terlindungi yaitu Owa Jawa, Elang, Lutung hingga Landak Jawa. (<https://news.detik.com/berita/d-6571951/jual-owa-hingga-landak-jawa-pria-di-bogor-ditangkap>) begitu dengan kasus-kasus lainnya.

Fakta ini menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan 20/2018.

Untuk melindungi satwa yang dilindungi maka diperlukan lembaga yang memiliki tugas dan kewenangan untuk menegakkan hukum, yaitu Kepolisian Negara

Republik Indonesia yang disingkat Polri. Polri merupakan alat negara yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dalam bidang menjaga keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 dan Pasal 5 dan 13 UU No 2 Tahun 2002 tentang Polri.

Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut maka Polri harus berperan aktif dalam mencegah setiap perbuatan pidana dan menindak setiap orang, organisasi, dan lembaga yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk pelanggaran dalam bentuk jual beli satwa yang dilindungi.

Jual beli satwa yang dilindungi merupakan perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang perlindungan satwa. Perbuatannya membawa bahaya bagi kelangsungan hewan satwa yang terlindungi, yaitu mengancam kepunahan dan mempercepat kepunahan, perbuatannya merupakan perbuatan komersial yang melahirkan keuntungan yang bisa merangsang orang lain untuk ikut melakukan pelanggaran yang sama dengan berburu, menangkap, dan menjual.

Oleh karena itu, perbuatan tersebut harus dicegah sehingga tidak menimbulkan bahaya bagi satwa yang dilindungi hal karena untuk memenuhi kebutuhan hidup bukan hanya dengan menjual belikan hewan yang dilindungi masih ada banyak pekerjaan yang dapat dikerjakan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setiap perbuatan yang bertentangan dengan hukum harus dicegah, ditindak dan dipulihkan.

Masih banyaknya perdagangan satwa yang dilindungi secara ilegal di Kabupaten Bogor merupakan persoalan hukum yang perlu dikaji secara ilmiah, oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wilayah Hukum Kabupaten Bogor.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian digunakan sebagai cara-cara yang diikuti dalam melakukan kegiatan penelitian. Mulai dari teknik pengumpulan data sampai pada teknik analisis yang digunakan. Hal ini disesuaikan dengan jenis penelitian yang dipilih oleh peneliti sesuai dengan topik atau judul permasalahan

Jenis penelitian ini ialah penelitian yuridis empiris yaitu suatu penelitian yang mencoba menganalisis permasalahan hukum yang timbul dari aktivitas atau perilaku masyarakat yang menyimpang. Meskipun penelitian ini merupakan penelitian empiris namun menggunakan pendekatan normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau norma, kaidah, dan asas-asas.(Paren et al., 2023) Oleh karena itu, untuk mengetahui dan menganalisis penelitian ini, metode-metode yang digunakan adalah metode pendekatan Yuridis Normatif yaitu hukum dikonsepsikan sebagai norma, kaidah, asas, atau dogma-dogma dengan menggunakan studi kepustakaan (penelaahan terhadap literatur) namun sepanjang diperlukan, dapat dilakukan interview, untuk melengkapi studi kepustakaan.(Yuniar et al., 2017)

Pendekatan normatif yaitu suatu penelitian yang menggunakan bahan hukum primer, sekunder, dan tersier sebagai bahan analisis, dan juga menggunakan teori, pendapat ahli dan hasil riset orang lain sebagai bahan analisis. Dalam penelitian lain juga menggunakan pendekatan pendekatan perundangundangan (*statute approach*). (Farida Apriliandy et al., n.d.) penulis juga memerlukan data lapangan yang diperoleh dari wawancara tidak langsung dari hasil tentang fakta-fakta yang terjadi di Bogor.

Penelitian menggunakan metode analisis secara dekriptif analisis yaitu data yang diperoleh dari hasil wawancara dan obsevasi, maupun melalui kepustakaan disajikan dalam bentuk deskripsi lalu dianalisis, hasil analisis ditarik sebagai suatu kesimpulan.(Prambudi et al., 2024) Metode analisis merupakan teknik menarik

kesimpulan dari hasil analisis yang digunakan dengan pendekatan penelitian yang dilakukan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wilayah Hukum Kabupaten Bogor

Penulis membahas peran peranan satuan reserse kriminal polres bogor dalam penindakan jual beli satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup dalam dua aspek:

1. Aspek Tugas dan Wewenang

Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor memiliki tugas dan wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang yang berlaku yaitu:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945)

UUD 1945 merupakan undang-undang yang memiliki kedudukan paling tinggi dari semua peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia yang disebut sebagai konstitusi. UUD 1945 juga mengatur tugas kepolisian dalam menegakkan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 30 ayat 4 UUD 1945 disebutkan bahwa polri sebagai alat negara bertugas menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani masyarakat, serta menegakkan hukum. Dari beberapa tugas pokok yang dimuat dalam konstitusi tersebut, terdapat tugas sebagai penegak hukum. Bila dikaitkan dengan perannya dalam menindak pelaku penjualan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup secara ilegal di Kabupaten Bogor, maka Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor memiliki kewenangan untuk menindak para pelaku.

Setiap perbuatan yang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan akan ditindak oleh pihak kepolisian yang artinya menegakkan hukum, oleh karena kegiatan menjual satwa yang dilindungi dalam keadaan

hidup-hidup tanpa ini merupakan perbuatan melawan hukum yang harus ditindak.

UUD 1945 tidak mengatur tentang satwa yang dilindungi tetapi mengatur atau memberikan tugas kepada pihak kepolisian untuk menindak setiap orang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri

Kewenangan yang diberikan kepada Polri melalui UUD 1945 diperluas dalam UU Polri yang merinci tugas dan fungsi Polri dalam menegakkan hukum. Tugas penegakan hukum merupakan salah satu tugas utama dari Polri yang harus dilaksanakan oleh semua satuan, termasuk Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor.

Terkait dengan tugas Polri sebagai penegak hukum disebutkan dalam Pasal 5 dan Pasal 13 UU Polri. Dalam ketentuan Pasal tersebut maka Polri berkewajiban melaksanakan tugasnya dalam menegakkan hukum, sehingga Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor sebagai bagian dari Polri perlu melaksanakan tugasnya dan memiliki peran dalam mencegah, menindak para pelaku tindak pidana perdagangan satwa yang dilindungi tanpa izin di wilayah hukum Polres Bogor.

Ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut memberikan legitimasi tugas Polri dalam menegakkan hukum terhadap semua tindak pidana yang dilakukan oleh masyarakat atau badan hukum.

c. **Aspek Penegakan Hukum**

Sebagai penegak hukum, Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor perlu melakukan beberapa upaya untuk menegakkan hukum terhadap pelaku perdagangan satwa yang dilindungi di wilayah hukum Polres Bogor.

Berdasarkan fakta yang ditemukan saat melakukan penelitian Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor telah melakukan upaya sosialisasi peraturan perundang-undangan, upaya pencegahan, dan penindakan.

1. Sosialisasi tentang peraturan perundang-undangan terkait satwa yang dilindungi.

Setiap peraturan perundang-undangan harus disosialisasikan agar semua orang mengetahuinya, termasuk Undang 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya serta peraturan menteri lingkungan hidup dan kehutanan 20/2018. Polri memiliki peran untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Oleh karena dalam negara hukum, setiap orang dianggap mengerti, mengetahui, dan memahami setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Namun kewajiban institusi untuk mensosialisasikan peraturan perundang-undangan sudah diundangkan.

2. Upaya pencegahan yang perlu dilakukan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor

Kegiatan pencegahan kejahatan merupakan upaya yang paling utama untuk mencegah terjadinya penjualan satwa yang dilindungi. Upaya pencegahan yang perlu dilakukan ialah dengan melakukan patroli lapangan, melakukan kerjasama dengan institusi terkait seperti dinas kehutanan, dinas pariwisata, dan dinas perlindungan satwa, membentuk Pos-pos di daerah hutan yang didiami hewan satwa yang dilindungi.

Kegiatan ini tentunya dapat diandalkan sebagai upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perdagangan satwa yang dilindungi. Polri tidak hanya menunggu orang melakukan kesalahan lalu mindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku, namun harus memberikan edukasi dan mencegah agar orang tidak melakukan perbuatan pidana.

Perlindungan hukum yang bersifat preventif. Hal ini dituangkan dalam bentuk peraturan preventif, yang pada hakikatnya merupakan tolok ukur seluruh perilaku sosial dan mencakup seluruh aspek perilaku manusia. Perlindungan hukum melalui pendekatan preventif yaitu seperangkat cara/usaha yang

dilakukan untuk mencapai pencegahan terhadap suatu tindakan yang mempunyai akibat hukum.(Halilintar et al., 2024)

3. Menindak setiap pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Apabila telah terjadi perdagangan satwa yang dilindungi maka pihak Polres Bogor melakukan proses hukum yang didasarkan pada ketentuan Kitab Undang-Undang Acara Pidana yang berlaku. Berdasarkan ketentuan KUHAP proses penanganan perkara pidana dilakukan melalui tahapan berikut:

- a. Tahap pemeriksaan di kepolisian

1. Apabila adanya laporan tentang adanya tindak pidana atau berdasarkan pengetahuan polisi, maka dapat dilakukan proses hukum dengan mendatangi lokasi untuk melakukan penyelidikan.
2. Kegiatan penyelidikan dilakukan untuk membuat terang suatu peristiwa yang diduga sebagai peristiwa pidana untuk disimpulkan bahwa peristiwa tersebut merupakan suatu peristiwa hukum.

3. Pemanggilan

Pihak kepolisian akan melakukan pemanggilan pada para pihak yang melakukan pelanggaran hukum atau yang dianggap sebagai saksi untuk dimintai keterangan guna membuat terang siapa saja yang terlibat dalam kegiatan yang dilarang. Setiap pelaku tindak pidana akan dipanggil oleh pihak kepolisian melalui surat pemanggilan. Begitu juga dengan pelaku pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin, Polres Sukabumi telah memanggil para pelaku untuk dimintai pertanggung jawaban.

4. Penangkapan

Kegiatan penangkapan dilakukan untuk menangkap orang yang melakukan kejahatan atau pelanggaran hukum terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku. Setiap pelaku akan ditangkap untuk dimintai pertanggungjawabannya. Hal ini merupakan kewenangan Polres Bogor

dalam melakukan penangkapan kepada pelaku pertambangan agar tidak melarikan diri atau kabur dari pertanggungjawaban hukum yang akan dituntut kepadanya. Polres Sukabumi melakukan penangkapan terhadap pelaku pertambangan secara ilegal untuk diproses dalam persidangan.

5. Penahanan

Polri memiliki kewenangan untuk menahan setiap orang yang berdasarkan keterangan saksi atau berdasarkan fakta bahwa ia terlibat dalam kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Tindakan lain yang dibolehkan dalam peraturan perundang-undangan yaitu melakukan penahanan. Setiap orang yang ditangkap akan ditahan dalam beberapa hari untuk menunggu masa waktu persidangan, guna menunggu putusan hakim atau putusan pengadilan untuk menjalani hukum sesuai dengan putusan pengadilan.

6. Penggeledahan

Pihak kepolisian berdasarkan kewenangannya dapat melakukan penggeledahan terhadap lokasi atau tempat yang diduga menjadi sarang atau lokasi dilakukannya tindak pidana. Penggeledahan dilakukan terhadap tempat kerja, rumah atau tempat lain yang berfungsi sebagai kegiatan pertambangan secara ilegal. Hal ini merupakan kewenangan Polres Bogor untuk menggeledah setiap rumah atau tempat kediaman pelaku tindak pidana pertambangan. Menggeledah tempat pertambangan untuk mengumpulkan bukti yang kuat

7. Penyitaan

Apabila ada barang bukti yang ditemukan oleh kepolisian yang masih dibawa kekuasaan tersangka maka barang tersebut dapat disita guna kepentingan pembuktian dalam persidangan. Penyitaan dapat dilakukan untuk mengumpulkan bukti yang kuat dari setiap tindak pidana tambang ilegal. Melakukan penyitaan terhadap barang bukti untuk dapat digunakan dalam persidangan sebagai alat bukti, sehingga setiap pelaku harus

menyerahkan setiap barang bukti untuk kepentingan pembuktian dan harus kooperatif tanpa melakukan perlawanan sehingga tidak menimbulkan tindakan dari pihak kepolisian.

Proses hukum yang dilakukan oleh pihak Polres Bogor dalam menangani tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku perdagangan satwa liar dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia.

Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wilayah Hukum Kabupaten Bogor

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Satuan Reserse Kriminal Polres untuk menindak pelaku tindak pidana penjualan satwa yang dilindungi ditemukan beberapa hambatan, yaitu:

1. Sulitnya mengetahui aktivitas penangkapan, sampai penjualan hewan satwa yang dilindungi

Kondisi hutan Bogor yang begitu luas membuat kepolisian Polres Bogor sulit untuk mengetahui aktivitas pelaku jual beli satwa yang dilindungi di hutan maupun dalam kota. Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh pelaku juga memperhitungkan pengawasan pihak kepolisian sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan pelaku.

2. Jumlah personil yang terbatas

Jumlah personil yang dimiliki oleh Polres Bogor khususnya Satuan Reserse Kriminal sangat terbatas untuk mengontrol atau mengawasi kegiatan masyarakat dalam melakukan kegiatan penangkapan satwa yang dilindungi, lokasi pemeliharaan, dan transaksi jual beli yang dilakukan.

Polri memiliki tanggung jawab dalam melindungi bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung dalam wilayah Republik Indonesia. Polri bertanggung jawab untuk

menciptakan dan mempertahankan lingkungan yang aman dan tertib dalam kehidupan masyarakat saat menjalankan tugas utamanya untuk memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.(Perkasa et al., 2024)

Dengan menegakkan hukum maka akan tumbuh pembangunan hukum yang baik di Indonesia. menurut Endeh Suhartini pentingnya pembangunan hukum di Indonesia terutama hukum ketenagakerjaan akan membawa dampak positif bagi masyarakat industri.(Remen et al., 2018) dan teori sistem hukum Friedmen. Sejalan dengan tujuan pembangunan nasional yang dicita-citakan maka pembangunan dilaksanakan secara menyeluruh di berbagai sektor kehidupan oleh pemerintah dan masyarakat. (Nurwati, 2015) pembangunan bidang ekonomi harus diarahkan kepada terwujudnya kesejahteraan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.(Syamsah dan J Jopie Gilalo, 2015) Cepatnya laju pertumbuhan penduduk di Indonesia mengharuskan semakin cepat juga pembangunan nasional yang dilakukan oleh Pemerintah.(Saepi Syawaludin et al., 2018)

Penegakan hukum dalam bentuk menindak pelaku tambang tanah ilegal di Bogor juga bertujuan untuk menjaga lingkungan hidup. Ketika lingkungan tumbuh kembang dengan baik, maka ia akan memberikan nilai kebaikan pula untuk kehidupan manusia.(Ridwan H. et al., 2024) yang bertujuan untuk mendingkat kemasalahatan bagi masyarakat secara umum Hal ini untuk mewujudkan negara yang bebas dari gangguan keamanan dan keteriban agar negara dapat kemaslahatan bagi umat atau rakyat yang dalam Islam disebut maqashid syariah.(Yumarni & Rumatiga, 2024)

Dari hasil penelitian orang lain yang dikutip dalam penelitian ini menunjukkan bahwa peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam menegakkan hukum selalu memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sepanjang tidak dirubah. Hal ini sesuai dengan pandangan Jopie Gilao bahwa berdasarkan ketentuan peralihan Konstitusi

Indonesia sebelum amandemen dikatakan bahwa aturan-aturan yang ada dan masih berlaku tetap dapat diberlakukan sepanjang belum diadakannya aturan yang baru.(Hukum & Rechtsstaat, 2015) Pembangunan nasional yang dilaksanakan dalam rangka menjalani salah satu tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum.(Hidayat et al., 2017)

KESIMPULAN

Hasil analisis dalam penelitian ini disimpulkan bahwa:

1. Peranan Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor dalam penindakan jual beli satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup di wilayah hukum kabupaten bogor dilihat dari dua aspek yaitu aspek tugas dan wewenang dan aspek penegakan hukum.
2. Hambatan Dalam Pelaksanaan Peran Satuan Reserse Kriminal Polres Bogor Dalam Penindakan Jual Beli Satwa Yang Dilindungi Dalam Keadaan Hidup Di Wilayah Hukum Kabupaten Bogor yaitu Sulitnya mengetahui aktivitas penangkapan, sampai penjualan hewan satwa yang dilindungi. Kondisi hutan Bogor yang begitu luas membuat kepolisian Polres Bogor sulit untuk mengetahui aktivitas pelaku jual beli satwa yang dilindungi di hutan maupun dalam kota. Kegiatan penangkapan yang dilakukan oleh pelaku juga memperhitungkan pengawasan pihak kepolisian sehingga menyebabkan sulitnya melakukan pengawasan pelaku. Jumlah personil yang terbatas. Jumlah personil yang dimiliki oleh Polres Bogor khususnya Satuan Reserse Kriminal sangat terbatas untuk mengontrol atau mengawasi kegiatan masyarakat dalam melakukan kegiatan penangkapan satwa yang dilindungi, lokasi pemeliharaan, dan transaksi jual beli yang dilakukan.

REFERENSI

- S., Hasan Ridwan, A., Suntana, I., Telaah Ekonomi Berkelanjutan Perspektif Hukum Ekonomi Islam., Al-Mas, S., Sunan Gunung Djati, U., & Berkelanjutan, E. (2024). Rechtsstaat (Jhd), Special Issue. <https://doi.org/10.30997/Jhd.Vi>
- Farida Apriliandy, S., Monaya, N., & Rumatiga, H. (N.D.). Pemenuhan Hak Anak Dalam Perkara Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Nomor 16 Tahun 2019.
- Halilintar, L., Gilalo, J. J., & Aminulloh, M. (2024). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Rumah Kpr Bersubsidi (Vol. 3).
- Hidayat, A., Roestamy, M., & Sihotang, S. (2017). Review Of Juridical Rights On Newsstand Buyer Of Traditional Market As A Results For Development Cooperation With Build Operate And Transfer (Bot) System In Bogor Tinjauan Yuridis Hak Pembeli Kios Hasil Kerjasama Pembangunan Pasar Tradisional Dengan Sistem Build Operate And Transfer (Bot) Di Kabupaten Bogor (Vol. 3, Issue 1).
- J.Jopie,. (2015). Asas Keseimbangan Dalam Perjanjian Franchise Menurut Ketentuan Pasal 1338 Kuhperdata Principles Of Balance In The Franchise Agreement Viewed From Article 1338 Of The Civil Code (Vol. 1, Issue 2).
- Paren, M. A., Yumarni, A., Rumatiga, H., & Djuanda, F. H. (2023). Analisis Yuridis Pelaksanaan Putusan Perdamaian Pembagian Harta Bersama. In Karimah Tauhid (Vol. 2, Issue 6).
- Gilalo, J. J., & Rumatiga, H. (2024). Penyelesaian Tindak Pidana Kdrt Terhadap Perempuan Berdasarkan Keadilan Restoratif (Vol. 3).
- Perlindungan Kreditur Dalam Eksekusi Jaminan Fidusia Pada Kredit Kendaraan Bermotor Protection Of Creditors In The Execution Fiduciary Guarantee Kendaraan Motor Credit Nurwati 1 Abstrak. (N.D.).
- Prambudi, F., Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Analisis Program Ketanggapsegeraan Patroli Sabhara Polres Bogor Di Wilayah Kabupaten Bogor (Vol. 3).
- Produktivitas Tanah Wakaf Untuk Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Untuk Mewujudkan Kesejahteraan Umum Saepi Syawaludin, P., Roestamy, M., & Sihotang, S. (2018). Development Of Waqf Land Productivity For The Contruction Of Housing To Low Income Society (Mbr) For Realizing General Welfare (Vol. 4, Issue 2). <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2018/01/1>
- Remen, O., Suhartini, E., & Yumarni, A. (2018). Dispute Settlement Of Industrial Relation Of Pt. Haengnam Sejahtera Indonesia In The Mediation Step Of Dinas Tenaga Kerja Of

Kabupaten Bogor Haengnam Sejahtera Indonesia Di Tingkat Mediasi Pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Bogor (Vol. 4, Issue 1).

Syamsah Dan J Jopie Gilalo, H. T. (2015). Upaya Menjamin Pelaksanaan Persaingan Usaha Yang Sehat Efforts To Ensure The Implementation Of A Healthy Competition (Vol. 1, Issue 1). [Www.Investoriindonesia.Com](http://www.investoriindonesia.com)

Yumarni, A., & Rumatiga, H. (2024). Penerapan Prinsip Larangan “Magrib: Maysir, Gharar, Dan Riba” Dalam Pembiayaan Yang Bergerak Di Bidang Usaha Non Halal (Vol. 3). [Https://Id.M.Wikipedia.Org/Wi](https://id.m.wikipedia.org/wi).

Yuniar, R., Ilyanawati, A., & Sihotang, S. (2017). Konsolidasi Tanah Perkotaan Terhadap Pembangunan Perumahan Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (Mbr) Di Kota Bogor Dan Kota Depok Consolidation Of Urban Land For The Construction Of Housing For Low Income Communities (Lic) In The Cities Of Bogor And Depok. In *Jurnal Ilmiah Living Law* (Vol. 9). [Http://Kursdollar.Net](http://kursdollar.net),